



## Revisi UU Pemilu Harus Lindungi Perempuan dari Kekerasan Politik

Siaran Pers, 3 Desember 2025

Dalam momentum *16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP)*, PUSKAPOL UI bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu menyerukan penguatan perlindungan bagi perempuan dalam politik elektoral. Seruan ini muncul karena maraknya kekerasan politik berbasis gender pada Pemilu 2024—mulai dari intimidasi, pelecehan, serangan digital, hingga tekanan psikologis.

Budaya politik yang masih menormalisasi kekerasan membuat perempuan tetap berada dalam posisi rentan. Sebagian besar partai politik belum memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, sehingga berbagai bentuk kekerasan kerap dianggap sebagai “biaya politik” yang harus diterima ketika perempuan memasuki arena politik. Lemahnya komitmen perlindungan juga tampak pada penyelenggara pemilu. PKPU No. 10/2023 tidak lagi memuat ketentuan pelarangan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak untuk diusulkan sebagai bakal calon anggota legislatif, padahal aturan tersebut sebelumnya tercantum dalam PKPU No. 31/2018. Penghapusan norma ini membuka celah bagi pelaku kekerasan untuk tetap lolos dan menduduki jabatan publik. Rilis media Komnas Perempuan (2024) menunjukkan bahwa terdapat calon legislatif berstatus tersangka kekerasan seksual terhadap anak yang tetap dicalonkan oleh partai politik, bahkan terpilih dan dilantik.

Komitmen terhadap keterwakilan perempuan juga melemah. Aturan pembulatan desimal ke bawah dalam PKPU No.10/2023 berdampak pada menurunnya pencalonan perempuan. Ada 38 dari total 84 dapil yang terdampak, dan hanya 1 dari 18 partai peserta Pemilu 2024 yang memenuhi kuota perempuan 30% di semua dapil. Ini menandakan hambatan struktural yang serius.

Kedua situasi ini—kekerasan politik berbasis gender dan melemahnya komitmen terhadap keterwakilan perempuan—menjadi alarm keras bagi demokrasi. Tanpa ruang politik yang aman dan inklusif, perempuan akan semakin terpinggirkan dari pengambilan keputusan politik. Karena itu, revisi UU Pemilu menjadi momentum penting untuk memastikan adanya struktur regulasi yang melindungi perempuan dan mendorong partisipasi politik yang lebih setara.



dua langkah strategis untuk memastikan revisi UU Pemilu benar-benar mendukung demokrasi yang inklusif dan setara gender.

### 1. Perkuat Afiriasi Gender

- o Penguatan kebijakan afirmasi di dalam kepengurusan partai (menyertakan minimal 30% di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) serta di dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu (mengubah frasa memperhatikan menjadi memuat 30% keterwakilan perempuan).
- o Terapkan sistem zipper murni dan distribusikan calon perempuan di minimal 30% dapil.
- o Berikan insentif bagi partai yang patuh dan sanksi bagi yang melanggar.
- o Tetapkan syarat minimal 3 tahun keanggotaan partai dan pendidikan kader untuk calon legislatif.

### 2. Integrasikan Perlindungan terhadap Kekerasan Politik Berbasis Gender

- o Definisikan kekerasan politik berbasis gender dalam UU.
- o Sediakan mekanisme pengaduan yang cepat, rahasia, dan sensitif korban.
- o Berikan perlindungan hukum dan psikologis bagi korban, saksi, dan pelapor.
- o Wajibkan KPU dan Bawaslu untuk mengedukasi partai, calon, dan pemilih tentang kekerasan politik berbasis gender sebagai pelanggaran serius terhadap demokrasi.

Puskapol UI bersama anggota koalisi lainnya menyerukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan—pembuat kebijakan, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil yang lebih luas—untuk bersama-sama mengawal revisi UU Pemilu agar menciptakan ruang politik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.

***"Demokrasi yang inklusif bukan hanya hak perempuan, tetapi prasyarat bagi keadilan dan kualitas demokrasi Indonesia. Tanpa langkah konkret ini, demokrasi kita berisiko terus mereproduksi ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan."***

\*\*\*

#### **Narahubung:**

Hurriyah, Direktur PUSKAPOL UI (0811916654)

Delia Wildianti, Peneliti PUSKAPOL UI (081221645621)

Teuku Harza Mauludi, Peneliti Puskapol UI (08277934365)



Dokumen *policy brief* secara lengkap dapat diakses melalui *QR code* yang disediakan dalam rilis ini.

